

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kemiskinan merupakan masalah klasik yang hampir bisa dikatakan akan tetap menjadi sebuah kenyataan abadi dalam kehidupan manusia. Pengertian kemiskinan sendiri adalah suatu konsep ilmiah yang lahir sebagai dampak dari pembangunan. Pembangunan sebagai suatu proses perbaikan yang berkesinambungan atas suatu masyarakat atau sistem sosial secara keseluruhan menuju kehidupan yang lebih baik atau manusiawi tidak bisa dipisahkan dari target-target yang tidak tercapai yang berimplikasi pada kemiskinan. Oleh karena itu dalam setiap pembahasan tentang pembangunan, maka pembahasan kemiskinan mendapatkan tempat yang cukup penting. Kemiskinan dipandang sebagai bagian dari masalah dalam pembangunan, yang keberadaannya ditandai oleh adanya pengangguran, keterbelakangan, yang kemudian meningkat menjadi ketimpangan. Secara bersamaan kenyataan tersebut bukan saja menimbulkan tantangan tersendiri, tetapi juga memperlihatkan adanya suatu mekanisme dan proses yang tidak sesuai lagi dalam menanggulangi kemiskinan.

Perkembangan pemikiran tentang kemiskinan secara nyata mengalami bentuk, yang secara ilmiah bisa diruntut kebelakang sebagai bagian dari pemikiran pembangunan secara menyeluruh. Evolusi pemikiran itu muncul sebagai respon atas hasil-hasil pembangunan yang dirasa kurang memadai. Selama proses pembangunan berlangsung ada banyak hambatan yang muncul, sebagai eksese dari penerapan teori-teori yang dijalankan.

Masalah kemiskinan di Indonesia telah menjadi topik pembicaraan dan fokus kebijakan sejak pemerintahan kolonial Belanda dengan meluncurkan suatu program anti kemiskinan lewat kebijakan yang dikenal dengan “politik etis”.

Meskipun masalah kemiskinan telah lama hidup di tengah-tengah bangsa Indonesia dan telah lama pula diupayakan untuk dihapuskan, namun masalah kemiskinan dan kesenjangan itu tetap ada dan hidup bersama bangsa ini. Walaupun perkembangan ekonomi bangsa ini secara agregat selama ini menunjukkan gambaran yang baik serta mendatangkan sejumlah pujian dari banyak kalangan, namun di dalam struktur ekonomi Indonesia sendiri segmen masyarakat yang relatif tertinggal dan berkembang sangat stagnan, kurang berdaya, dan secara relatif tidak memperoleh manfaat maksimal dari hasil-hasil pembangunan. Mereka ini adalah golongan miskin. Lapisan ini merupakan bagian terbawah dari masyarakat dengan jumlah yang cukup besar yakni 49,5 juta jiwa atau 24,20% dari total penduduk Indonesia pada tahun 1998. Kebanyakan mereka bekerja atau berada di sektor pertanian, peternakan dan perikanan. Karena itu meskipun pertumbuhan ekonomi secara agregat cukup meyakinkan, tetapi golongan masyarakat miskin ini belum memperoleh manfaat nyata dari proses pembangunan yang berlangsung selama ini.

Ketika perkembangan ekonomi Indonesia banyak dipuji lembaga-lembaga internasional, pemerintah merasa perlu mengungkap sisi lain dari keberhasilan tersebut, yakni kemiskinan pada sebagian masyarakat untuk diselesaikan lewat berbagai program pembangunan pemerintah maupun non pemerintah. Hal itu merupakan bagian dari komitmen pemerintah untuk melakukan perbaikan pada proses pembangunan, disamping

tentu saja secara implisit bisa dipandang sebagai bentuk pengakuan akan adanya sasaran yang keluar dari pembangunan selama itu. Selanjutnya bisa dicontohkan, bahwa golongan miskin yang perlu mendapatkan perhatian dari pemerintah antara lain: petani gurem yang memiliki lahan pertanian yang sempit, buruh tani, nelayan, perambah hutan, penganggur, anak-anak putus sekolah (*droup out*), dan golongan yang tidak mampu melanjutkan sekolah. Semua kelompok di atas merupakan anggota masyarakat yang sangat rentan dan sangat terbatas kemampuannya untuk meraih sumberdaya ekonomi yang memungkinkan mereka untuk hidup layak.

Pemahaman tentang profil kemiskinan (*poverty profile*) merupakan prasyarat bagi ketepatan strategi pengentasan kemiskinan. Kemiskinan bukanlah merupakan sesuatu yang tidak berbentuk (*amorphous*), tetapi merupakan fenomena yang bersifat kompleks dan multidimensional.¹ Tentang profil kemiskinan ini Gunawan Sumodiningrat, Budi Santoso, dan Mohammad Maiwan juga mengungkapkan bahwa masalah kemiskinan bukan saja masalah *welfare*, akan tetapi mengandung berbagai alasan.²

Pertama, masalah kemiskinan adalah masalah kerentanan (*vulnerability*). Hal ini misalnya jika pembangunan struktur ekonomi dan pertanian dapat saja meningkatkan pendapatan petani dalam besaran yang memadai, akan tetapi jika saja terjadi kekeringan

¹ Moeljarto Tjokrowinoto, *Pengembangan Kawasan dan Pengentasan Kemiskinan* dalam buku *Liberalisasi Ekonomi, Pemerataan dan Kemiskinan*, (Yogyakarta: PT Tiara Wacana Yogya, 1995), h. 85

² Gunawan Sumodiningrat, Budi Santoso, dan Mohammad Maiwan, *Op.Cit*, h. 48. Lihat juga M. Ravallion dan M. Huppi, *Measuring Change in Poverty: A Methodological Case Study of Indonesia during an Adjustment Period*, (The World Bank Economic Review, 1991), h. 57-82

musim dua tahun berturut-turut, maka akan dapat menurunkan tingkat hidupnya sampai pada titik yang terendah.

Kedua, kemiskinan berarti tertutupnya akses kepada berbagai peluang kerja, karena hubungan produksi di dalam masyarakat tidak memberi peluang bagi mereka untuk berpartisipasi dalam produksi, atau mereka terperangkap dalam hubungan produksi yang eksploitatif, yang menuntut kerja keras dalam jam kerja yang panjang dengan imbalan yang rendah. Hal ini disebabkan oleh rendahnya tawar menawar mereka dalam struktur hubungan dependensi kepada pemilik tanah, rentenir, pimpinan proyek, kepala desa dan sebagainya.

Ketiga, kemiskinan adalah masalah ketidakpercayaan, perasaan impotensi emosional dan sosial menghadapi elit desa dan para birokrat dalam menentukan keputusan yang menyangkut dirinya tanpa memberikan kesempatan untuk mengaktualisasikan ketidakberdayaan menghadapi penyakit, kematian, kekumuhan, dan kekotoran.

Keempat, kemiskinan juga berarti menghabiskan semua atau sebagian besar penghasilan golongan miskin untuk konsumsi pangan dengan kuantitas dan kualitas yang terbatas, sehingga konsumsi gizi mereka amat rendah yang mengakibatkan produktifitas dan etos kerja mereka rendah pula. Di samping itu juga akan menghasilkan ketahanan fisik yang juga rendah.

Kelima, kemiskinan juga ditandai oleh tingginya rasio ketergantungan, karena besarnya keluarga dan beberapa diantaranya masih balita. Hal ini akan berpengaruh pada

rendahnya konsumsi yang akan mengganggu tingkat kecerdasan mereka, sehingga dalam kompetisi merebut peluang dan kesempatan di masyarakat, anak-anak kaum miskin akan berada pada pihak yang lemah.

Keenam, kemiskinan juga terefleksikan dalam budaya kemiskinan sebagaimana disinggung di atas, yang diwariskan dari satu generasi ke generasi yang lain. Penghapusan *physical poverty* tidak secara otomatis akan menghapuskan *culture of poverty*. Budaya kemiskinan yang secara turun temurun antar generasi ini cenderung menghambat motivasi untuk melakukan mobilitas ke atas. Dan itu berarti menghambat kemajuan dan harapan-harapan mereka di masa depan.

Jumlah pengangguran yang semakin meningkat dari tahun 1998 sampai 2003, yang mana jumlahnya diperkirakan 10,1 juta jiwa juga semakin menambah kompleksnya permasalahan bangsa. Sementara angka kemiskinan pada tahun 1998 semakin membengkak menjadi 49,5 juta jiwa atau 24,20% dari total penduduk Indonesia, walaupun selanjutnya menunjukkan penurunan sampai pada tahun 2003. angka kemiskinan ini terkait erat dengan ketersediaan lapangan kerja.³ Dengan pertumbuhan ekonomi yang relatif rendah, penyediaan tambahan lapangan kerja menjadi sangat terbatas sehingga belum mampu menyerap tambahan angkatan kerja baru.

Salah satu kemungkinan strategis dalam perjuangan penanggulangan kemiskinan ialah melalui sisi agama. Dengan menyadari bahwa manusia adalah wakil Allah di bumi,

³ Susilo Bambang Yudhoyono, *Ringkasan Disertasi: Pembangunan Pertanian dan Perdesaan sebagai Upaya Mengatasi Kemiskinan dan Pengangguran*, (Sekolah Pascasarjana, IPB, 2004), h. 26

maka segala apa yang ada di bumi adalah amanah bagi manusia dari Allah agar digunakan sebaik-baiknya bagi kesejahteraan bersama. Dalam pencapaian tujuan ini, Allah memberikan petunjuk melalui para Rasul-Nya yang meliputi segala sesuatu yang dibutuhkan manusia, baik akidah, akhlak, maupun syari'ah.

Teori Ekonomi Islam mengemukakan bahwa ketika perekonomian suatu negara dilanda kekacauan dengan sebab-sebab sebelumnya yang kebanyakan menyimpang dari syari'at Islam, maka manusia sebagai *khalifah* Allah swt di bumi harus menyadari bahwa segala hal yang ada di bumi adalah amanah bagi manusia agar digunakan sebaik-baiknya bagi kesejahteraan bersama.⁴ Dalam pencapaian tujuan ini Allah swt memberikan petunjuk melalui para Rasul-Nya yang meliputi segala sesuatu yang dibutuhkan manusia baik aqidah, akhlaq maupun syari'ah.

Syari'ah yang merupakan petunjuk bagi manusia senantiasa berubah sesuai dengan kebutuhan dan taraf peradaban umat, yang berbeda-beda sesuai dengan masa rasul masing-masing, seperti yang diungkap dalam Al-Qur'an:

لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شَرْعَةً وَمِنْهَا جَا^ء

Artinya: "... Untuk tiap-tiap umat di antara kamu, Kami berikan aturan dan jalan yang terang..." (Al-M idah/5: 48)

⁴ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), Cet. 1., h. 3-4

Yang cukup menarik perhatian bagi para ekonom adalah sebuah strategi yang mampu mencapai kesempatan kerja penuh, penanggulangan kemiskinan, memenuhi kebutuhan pokok, dan meminimalkan ketidakmerataan pendapatan dan kekayaan.

Islam mengenal akan istilah *tsawâbit wa mutaghayyirât* (*principle and variables*). Dalam sektor ekonomi misalnya, yang merupakan prinsip adalah larangan riba, sistem bagi hasil, pengambilan keuntungan, pengenaan zakat, dan lain-lain. Adapun contoh variabel adalah instrumen-instrumen untuk melaksanakan prinsip-prinsip tersebut, seperti aplikasi prinsip jual beli dalam modal kerja, penerapan asas *mudlârabah* dalam investasi atau penerapan *bai' al-salâm* dalam pembangunan suatu proyek.

Dari pemikiran di atas akan melahirkan pernyataan, bahwa perekonomian masyarakat terutama dalam penanggulangan kemiskinan akan tercapai bila menggunakan kerangka kerja atau acuan norma-norma islam. Dalam hal ini banyak ayat Al-Qur'an yang menyerukan penggunaan kerangka kerja perekonomian islam, diantaranya adalah:

﴿ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ ۖ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ ۖ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا ۖ قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرِبَهُمْ ۖ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِن رِّزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿٦٠﴾

Artinya: Dan (Ingatlah) ketika Musa memohon air untuk kaumnya, lalu kami berfirman: "Pukullah batu itu dengan tongkatmu". lalu memancarlah daripadanya dua belas mata air. sungguh tiap-tiap suku Telah mengetahui tempat minumnya (masing-masing). makan dan minumlah rezki (yang diberikan) Allah, dan janganlah kamu berkeliaran di muka bumi dengan berbuat kerusakan. (*Al-Baqarah/2: 60*)

Semua ayat itu merupakan penentuan dasar pikiran pesan Al-Qur'an dalam bidang ekonomi. Dari ayat-ayat di atas dapat dipahami bahwa Islam mendorong penganutnya untuk menikmati karunia yang diberikan oleh Allah sesuai dengan aturan syari'ah Islam.

Pendekatan sistem ekonomi Islam merupakan ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam.⁵ Sistem ekonomi Islam mempelajari tata kehidupan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dalam mencapai ridha Allah. Dengan demikian Islam berusaha untuk menghubungkan aspek perekonomian dengan kerohanian dalam kehidupan manusia. Dari sini bisa disimpulkan bahwa sistem ekonomi Islam dengan mengharap ridha Allah akan berangsur-angsur bisa menyelesaikan masalah kemiskinan dan keterbelakangan masyarakat, terutama yang tinggal di pedesaan.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis dapat mengidentifikasi permasalahan, bahwa sebagian besar penduduk miskin tinggal di pedesaan, yaitu dari 28,55 juta penduduk miskin di Indonesia pada tahun 2013 sebagian besar atau 17,95 juta atau 63% dari populasi penduduk miskin tinggal di pedesaan.

⁵ Muhammad Mannan, *Ekonomi Islam Teori dan Praktek*, Terjemah M. Mastangin, (Yogyakarta: PT Dana Bhakti Prima Yasa, 1997), h. 19

Faktor penyebab kemiskinan adalah ketiadaan kemampuan masyarakat desa untuk mengakses lembaga permodalan yang diakibatkan ketatnya ketentuan pemberian kredit oleh lembaga perbankan.

Kemiskinan bukan hanya tanggungjawab pemerintah, semua komponen bangsa bertanggungjawab baik itu lembaga swasta, lembaga profesi, perguruan tinggi maupun masyarakat dan kelompok masyarakat yang ada.

Berdirinya Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) di perdesaan adalah upaya masyarakat dan kelompok masyarakat untuk berperan dalam melakukan pengentasan kemiskinan di perdesaan.

Bagaimana kontribusi LKMS dalam pemberdayaan masyarakat perdesaan dalam rangka mengurangi tingkat kemiskinan di perdesaan. Permasalahan inilah yang akan dilakukan penelitian oleh penulis.

2. Batasan Masalah

Agar penelitian ini lebih efektif dan terarah, maka perlu pembatasan masalah.

Dalam penelitian ini difokuskan pada hal-hal berikut :

- a. Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) adalah lembaga keuangan yang memberikan pelayanan jasa kepada masyarakat berpenghasilan rendah dan miskin serta para pengusaha kecil.⁶ Badan usaha yang bergerak dalam pemberian pembiayaan kepada pelaku usaha kecil dan mikro seperti Koperasi Simpan pinjam maupun BMT.

⁶ Manurung, Mandala dan Prathama Rahardja. 2004, *Uang, Perbankan, dan Ekonomi Moneter*, (Jakarta: Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 20014), h 124

- b. Penelitian dilakukan di lakukan pada KJKS El Ehsan Kabupaten Pringsewu Propinsi Lampung.
- c. Pelaku usaha ekonomi lemah adalah pelaku usaha kecil dan mikro yang berada diperdesaan diwilayah kerja KJKS El Ehsan.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas, maka dapat dikemukakan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana peran KJKS BMT El Ehsan dalam rangka pemberdayaan ekonomi masyarakat perdesaan?
2. Bagaimana kendala KJKS BMT El Ehsan dalam rangka pemberdayaan ekonomi masyarakat perdesaan

D. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai melalui penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis secara mendalam peran pemberdayaan yang dilakukan oleh KJKS El Ehsan kepada pelaku UKM usaha lemah di daerah perdesaan?
2. Untuk mengetahui dan menganalisis secara mendalam kendala KJKS BMT El Ehsan dalam rangka pemberdayaan ekonomi masyarakat perdesaan?

E. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

- a. Dapat memberikan kontribusi akademik dan keilmuan pada bidang lembaga keuangan syaria'ah, serta menjadi rujukan atau referensi penelitian berikutnya tentang masyarakat perdesaan.
- b. Dapat bermanfaat selain sebagai bahan informasi juga sebagai literatur atau bahan informasi ilmiah.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan alat masukan yang berguna bagi pengambil kebijakan untuk pemberdayaan masyarakat perdesaan dan para pelaku LKMS dalam rangka pemberian pembiayaan kepada pelaku usaha kecil dan mikro di daerah perdesaan.

F. Kerangka Pikir

Kerangka pemikiran dalam rencana penelitian ini adalah keterkaitan peranan Lembaga Keuangan Mikro Syariah yang selanjutnya disingkat LKMS dalam memberikan pembiayaan atau akses permodalan kepada pelaku usaha kecil dan mikro yang tidak tersentuh oleh lembaga keuangan formal dalam hal ini bank termasuk BPR.

Lembaga keuangan yang khusus didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha yang tidak semata-mata mencari keuntungan. LKM bertujuan untuk:

- a. meningkatkan akses pendanaan skala mikro bagi masyarakat;
- b. membantu peningkatan pemberdayaan ekonomi dan produktivitas masyarakat; dan
- c. membantu peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat terutama masyarakat miskin dan/atau berpenghasilan rendah.

Bentuk badan hukum LKM/LKMS adalah Koperasi. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatan berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.

Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) adalah koperasi yang kegiatan usahanya bergerak di bidang pembiayaan, investasi, dan simpanan sesuai pola bagi hasil (syariah).

BMT adalah Baitul Maal wat Tamwil yaitu sistem intermediasi keuangan di tingkat mikro yang didalamnya terdapat Baitul Maal dan Baitul Tamwil yang dalam operasionalnya dijalankan dengan menerapkan prinsip-prinsip syari'ah.

KJKS-BMT adalah Koperasi Jasa Keuangan Syariah Baitul Maal wat Tamwil yaitu sistem intermediasi keuangan di tingkat mikro yang berbadan hukum koperasi yang didalamnya terdapat Baitul Maal dan Baitul Tamwil yang dalam operasionalnya dijalankan dengan menerapkan prinsip-prinsip syari'ah.

Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah, dengan kriteria :

1. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau

2. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);

Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria, sebagai berikut :

1. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
2. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah);

Beberapa kesulitan yang dihadapi UMKM dalam antara lain adalah :

- (1) Kurang permodalan,
- (2) Kesulitan dalam pemasaran,
- (3) Persaingan usaha ketat,
- (4) Kesulitan bahan baku,
- (5) Kurang teknis produksi dan keahlian,
- (6) Keterampilan manajerial kurang,
- (7) Kurang pengetahuan manajemen keuangan, dan
- (8) Iklim usaha yang kurang kondusif (perijinan, aturan/perundangan).

Masyarakat perdesaan, adalah sekelompok penduduk yang tinggal atau bermukim diperdesaan. Peta kepemilikan sumber daya akan menentukan klasifikasi desa. Menurut Mubiyarto ada sembilan karakteristik desa yaitu, desa persawahan, desa lahan kering, desa perkebunan, desa peternakan, desa nelayan, desa hutan, desa industry kecil, desa buruh industry, serta desa jasa dan perdagangan.

Untuk lebih jelasnya dalam memahami kerangka pikir dalam penelitian ini dapat dilihat pada gambar di bawah ini:

